

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan paradigma pembangunan yang setidaknya terlihat dari aspek perencanaan, aspek pengelolaan seluruh sumberdaya, dan aspek kelembagaannya. Dalam hal aspek perencanaan, khususnya, telah terjadi perubahan pendekatan dari yang bersifat *top-down* menjadi bersifat *bottom-up*. Hal ini berarti bahwa pembangunan nasional juga akan memberi konsekuensi lebih yang berorientasi pada kebutuhan pembangunan daerah. Artinya, daerah atau pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya dan sumber dana secara optimal. Dengan demikian, daerah akan memutuskan sendiri pola dan bentuk kawasan yang akan diandalkan untuk dikembangkannya, maupun sektor atau produk-potensi daerah yang akan diunggulkannya untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Perubahan paradigma tersebut akan memberikan peran baru kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini kelembagaan lokal dalam pembangunan ekonomi daerah akan semakin penting dan sangat diakui keberadaannya. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masing-masing. Latar belakang demografi, geografis, ketersediaan infrastruktur dan budaya yang tidak sama, serta kapasitas sumber daya yang berbeda, memiliki konsekuensi adanya keberagaman kinerja daerah dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan. Perbedaan kinerja selanjutnya akan menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, meningkatnya tuntutan daerah, dan kemungkinan disintegrasi bangsa.

Ketidakmerataan pembangunan yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan adanya disparitas antar wilayah. Perbedaan perkembangan antar wilayah tersebut dapat menimbulkan kesenjangan antar

masyarakat dalam masing-masing wilayah. Kesenjangan antar daerah di Indonesia sangat terasa. Permasalahan ini memerlukan perhatian yang harus segera diambil tindakan apabila ketimpangan ini tidak ingin semakin parah. Pembangunan yang telah dilakukan selama ini justru menimbulkan dampak kesenjangan. Terjadinya bias pembangunan antara kota dengan desa, antara Jawa dan luar Jawa, antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, semua itu terjadi karena pembangunan yang dilaksanakan kurang memperhatikan aspek perwilayahan (*regional approach*), kurang memperhatikan antara fungsi wilayah dalam kerangka jejaring saling ketergantungan ekonomi antara kota-desa, antara Jawa dan luar Jawa, antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, akibatnya pembangunan yang dilaksanakan hanya terpusat pada daerah kota, daerah Jawa, dan Indonesia Barat.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah juga ditandai dengan rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial terutama masyarakat di perdesaan, wilayah terpencil, perbatasan serta wilayah tertinggal. Ketimpangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, tertinggalnya pembangunan kawasan perdesaan dibanding dengan perkotaan, dan tingginya ketergantungan kawasan perdesaan terhadap kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi pendukung, dan pemasaran hasil-hasil produksi di perdesaan.

Adapun salah satu permasalahan yang mendasari ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia adalah karena keterbelakangan. Salah satu penyebab keterbelakangan dari daerah-daerah yang terletak di pinggiran (*periphery*) adalah hubungan yang eksploitatif antara bagian wilayah pinggiran dengan wilayah-wilayah pusat (Ian Roxborough, 1990:37). Kiasan umum yang paling sering digunakan adalah lingkaran setan kemiskinan, dengan argumentasi bahwa pada wilayah-wilayah pinggiran terdapat rantai-rantai yang menyebabkan kemiskinan tetap bertahan di dalamnya dan mencegah kemajuan. Salah satu solusi yang dapat membalik rantai-rantai tersebut adalah sebuah perubahan serentak (*sharp-rupture*) yang menganalisa sebab-sebab bertahannya kemiskinan. Perubahan serentak pada saat tertentu akan

menghasilkan suatu gerakan yang mampu mendukung kemandirian dalam sebuah wilayah (Myrdal, 1957).

Pada tahun 2007 terdapat beberapa permasalahan utama yang diperkirakan akan menghambat pengurangan ketimpangan wilayah. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah terisolir, antara lain : (1) terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju; (2) kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar; (3) kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan manusia; (4) belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung; dan (5) belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah ini (www.bappenas.go.id).

Ketimpangan pembangunan menyebabkan timbulnya permasalahan kemiskinan di daerah-daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan. Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Luasnya wilayah dan beragamnya budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Sebagaimana yang menjadi acuan bagi segenap upaya pemulihan, Program Pembangunan Nasional 2001-2005 (Propenas 2001-2005; II-8) menginginkan bahwa pemulihan ekonomi harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat, baik selaku konsumen, angkatan kerja, maupun pengusaha. Masyarakat pelaku ekonomi kecil merasa ditinggalkan karena perhatian pemerintah dianggap tidak peka terhadap prakarsa yang diajukan daerah. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama yang makin lama berakibat pada hilangnya prakarsa dari masyarakat bawah baik dalam merencanakan maupun melaksanakan pembangunan, apalagi dalam mengawasi pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu ditata ulang agar sistem ekonomi kerakyatan dapat terlaksana.

Dalam sistem ekonomi kerakyatan semua lapisan masyarakat mendapatkan hak untuk memajukan kemampuannya, kesempatan, dan

perlindungan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan partisipasinya secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Seiring dengan krisis ekonomi yang terjadi, permasalahan bangsa yang harus diselesaikan juga kompleks, terutama yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan yang meningkat secara drastis. Berdasarkan perhitungan BPS pada bulan Agustus 1999 tercatat jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat menjadi 37,5 juta jiwa. Hasil survei sebelum krisis (1996), jumlah penduduk miskin sebesar 22,5 juta jiwa atau 11,5 persen. Mengacu pada data tersebut maka krisis ekonomi yang terjadi telah meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 15 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk miskin tersebut didapatkan dari limpahan sektor industri besar yang gulung tikar, sehingga menyebabkan PHK besar-besaran yang pada akhirnya menjadikan orang miskin baru. Kondisi tersebut menjadikan upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan sebelum krisis menjadi tidak berarti. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, upaya yang dilakukan pemerintah tersebut telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan, terutama pada dekade tahun 1990-an. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode 1970 – 1990 golongan masyarakat miskin relatif telah mengalami penurunan cukup signifikan, yakni dari 60 persen menjadi 15 persen dari jumlah penduduk total. Penurunan sebesar 45 persen selama kurun waktu 20 tahun ini tentunya merupakan satu prestasi tersendiri yang sangat berarti. Pada tahun 1990, jumlah orang miskin di Indonesia diperkirakan 27,2 juta orang, sedangkan pada tahun 1993 menjadi 25,9 juta orang, dan pada tahun 1996 diperkirakan tinggal 11,3 persen dari jumlah penduduk 200 juta, yakni sekitar 22,5 juta orang, yang tersebar di 20.633 desa tertinggal di Indonesia.

Potret tentang kemiskinan serta ketertinggalan desa sangat beragam. Adapun definisinya, kemiskinan dapat menjadi sangat mencekam karena diwariskan dari generasi ke generasi. Seorang anak yang tidak mengecap pendidikan karena keluarganya terlibat kemiskinan, akan membawa kemiskinan tersebut ketika tumbuh menjadi orang dewasa. Banyak faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan politik yang bekerja sendiri-sendiri atau berinteraksi satu sama lain menjadikan kemiskinan bertahan untuk kurun waktu yang lama di desa-desa (Suyono Dikun, 1994). Penduduk desa tertinggal

umumnya masih dihadapkan pada persoalan yang sangat mendasar, yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang terdiri dari kebutuhan individu dan keperluan akan pelayanan sosial merupakan hal yang sangat fundamental dan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia.

Untuk menurunkan jumlah keluarga miskin diperlukan upaya-upaya yang bersifat pemulihan, yang pada akhirnya nanti diharapkan keluarga miskin tersebut mampu mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan langkah-langkah untuk memberdayakan ekonomi keluarga miskin. Pemikiran tersebut didasarkan pada asumsi bahwa jika ekonomi keluarga miskin telah berdaya, secara berlahan-lahan mereka akan mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran *stakeholder* serta pemerintah daerah dilaksanakan untuk mendorong kemandirian dan sinergi berbagai pihak dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan di perdesaan dan sebagai upaya keberlanjutan program. Hal ini juga akan mendorong penyelarasan dengan program lain, meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat dan meningkatkan prospek pencapaian tujuan bersama dalam meningkatkan pelayanan, khususnya kepada masyarakat miskin, pencapaian tujuan pengurangan kemiskinan.

Sumber daya alam yang sangat besar dan posisi geografis yang strategis, serta iklim yang memungkinkan untuk pendayagunaan lahan sepanjang tahun, merupakan modal utama pembangunan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini potensi yang sangat besar itu belum berhasil secara nyata meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup banyak, hal ini ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan penduduk untuk mendapatkan akses dan peluang yang sama dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Kondisi tersebut mengakibatkan: (i) semakin tingginya beban sosial ekonomi masyarakat; (ii) rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya; (iii) rendahnya partisipasi aktif masyarakat; (iv)

menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; dan (iv) kemungkinan menurunnya mutu generasi yang akan datang (PIIP-2006).

Permasalahan kemiskinan di perdesaan juga menyangkut dimensi gender. Paradigma yang ada saat ini mengakibatkan laki-laki dan perempuan masih mempunyai peranan dan tanggung jawab yang berbeda dalam rumah tangga dan masyarakat. Hal ini mengakibatkan laki-laki dan perempuan mempunyai akses, kontrol dan prioritas yang berbeda dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan politik.

Masyarakat miskin di daerah pesisir dan daerah tertinggal menghadapi permasalahan yang sangat khusus. Mereka pada umumnya menggantungkan hidup dari pemanfaatan sumber daya laut dan pantai yang membutuhkan investasi besar, sangat bergantung pada musim, dan rentan terhadap polusi dan kerusakan ekosistem pesisir. Mereka hanya mampu bekerja sebagai nelayan kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil, dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi yang sangat kecil. Nelayan kecil hanya mampu memanfaatkan sumber daya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang cenderung terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumber daya pantai. Hasil tangkapan juga mudah rusak sehingga melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan. Di samping itu, pola hubungan eksploitatif antara pemilik modal dengan buruh, serta usaha yang bersifat musiman dan tidak menentu menyebabkan masyarakat miskin di kawasan pesisir cenderung sulit keluar dari jeratan kemiskinan (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 2004-2009).

Pengembangan desa tertinggal dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi lokal secara maksimal. Dengan peningkatan ekonomi lokal, diharapkan perekonomian desa tertinggal tidak lagi tergantung pada daerah lain dan desa tersebut mampu menjadi desa yang mandiri. Salah satu masalah yang dihadapi dalam peningkatan ekonomi lokal adalah kurang tersedianya infrastruktur yang memadai, terutama di daerah perdesaan. Kondisi pelayanan infrastruktur perdesaan umumnya masih kurang, hal ini terlihat dari sebagian besar penduduk di desa tertinggal harus menempuh jarak sejauh 6-10 km ke pusat pemasaran (terutama pusat kecamatan), bahkan di desa lainnya penduduk harus

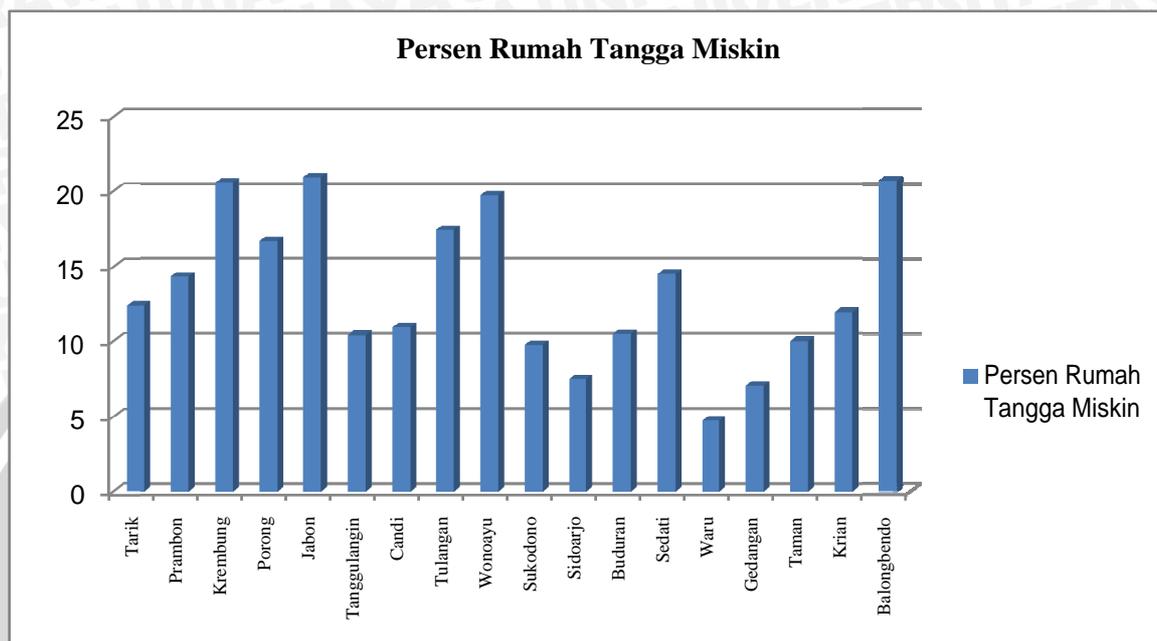
menempuh jarak lebih dari 10 km dengan kondisi jalan yang memprihatinkan. Penduduk yang terlayani air minum perpipaan perdesaan masih sangat rendah, selebihnya masih mengambil langsung dari sumber air yang belum terlindungi. Sementara itu, banyak petani di desa tertinggal memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 ha (lahan marjinal). Dengan kondisi tersebut maka dibutuhkan strategi penanganan penyediaan infrastruktur perdesaan yang dapat mendukung terjaminnya peningkatan dan keberlanjutan kegiatan perekonomian di perdesaan (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 2004-2009).

Berdasarkan RTRW Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam lingkup pengembangan GERBANG KERTOSUSILA, yang merupakan potensi yang sangat menguntungkan baik dalam pengembangan ekonomi wilayah pada masa yang akan datang maupun perkembangan tata ruang wilayahnya. Sektor yang memiliki klasifikasi sangat strategis di Kabupaten Sidoarjo adalah sektor pertanian, perindustrian, perikanan/pertambakan. Sedangkan sektor yang termasuk dalam klasifikasi strategis adalah sektor perdagangan dan jasa, sektor sarana dan prasarana transportasi.

Kabupaten Sidoarjo yang merupakan wilayah orde 2 yang sangat identik dengan kemajuan wilayahnya karena berdekatan dengan ibukota propinsi dan terletak di jalur utama. Kemajuan Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan dengan nilai PAD yang menempati tempat kedua tertinggi setelah Kota Surabaya. Namun dalam perkembangannya, dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo juga terjadi kesenjangan antara wilayah timur dan barat Kabupaten Sidoarjo. Wilayah Timur cenderung lebih cepat berkembng karena dilalui oleh jalan arteri primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan wilayah-wilayah lain. Dengan adanya jalan arteri primer tersebut maka pembangunan di Kabupaten Sidoarjo lebih banyak difokuskan secara linier di sepanjang jalan arteri, sehingga pembangunan di wilayah lain khususnya wilayah yang jauh dari jalan utama tersebut tidak terlalu diperhatikan.

Kabupaten Sidoarjo yang pesat pertumbuhannya ternyata masih memiliki daerah dengan tingkat perekonomian rendah, khususnya di Kecamatan Jabon yang terletak cukup jauh dari pusat pertumbuhan Kabupaten Sidoarjo yaitu Kecamatan Sidoarjo. Berdasarkan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk tahun 2005,

Kecamatan Jabon merupakan kecamatan dengan klasifikasi warna merah yang berarti persentase rumah tangga miskin di Kecamatan Jabon lebih dari 18,70 %. Perbandingan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada gambar 1..



Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sidoarjo

Persentase rumah tangga miskin di Kecamatan Jabon merupakan yang terbesar di Kabupaten Sidoarjo yaitu sebesar 20,96 %. Jumlah penduduk miskin yang besar di Kecamatan Jabon menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Jabon cenderung lebih lambat bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo. Letak Kecamatan Jabon yang jauh dari pusat pertumbuhan dan ditambah dengan terjadinya bencana semburan lumpur menyebabkan beberapa desa dan kelurahan di Kecamatan Jabon menjadi daerah yang semakin tertinggal. Semburan lumpur menyebabkan terjadinya pencemaran air di Kecamatan Jabon. Hal tersebut sangat tidak menguntungkan karena potensi utama dari Kecamatan Jabon adalah perikanan darat yang ditunjang dengan luasan lahan perikanan darat yang mencapai 50,34 % dari total luas Kecamatan Jabon. Pencemaran air menyebabkan semakin menurunnya kuantitas dan kualitas hasil produksi tambak Kecamatan Jabon.

Apabila di cermati secara seksama, sesungguhnya daerah-daerah yang di kategorikan sebagai daerah tertinggal bukanlah daerah yang mempunyai

sumberdaya alam rendah atau nihil, tetapi sebaliknya daerah-daerah tersebut memiliki banyak potensi sumber daya alamnya. Bahkan tidak sedikit dari daerah-daerah tersebut yang selama ini di eksploitasi untuk kepentingan kawasan-kawasan maju. Perkembangan Kecamatan Jabon yang cenderung lebih lambat dari kecamatan lain di Kabupaten Sidoarjo tidak menunjukkan bahwa Kecamatan Jabon akan tetap dan selalu menjadi kecamatan yang tertinggal. Desa dan kelurahan di Kecamatan Jabon memiliki berbagai macam potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk menunjang pertumbuhan perekonomian Kecamatan Jabon. Potensi ekonomi tersebut antara lain adalah potensi sektor pertanian khususnya sub sektor perikanan darat serta potensi pengembangan industri kecil dan rumah tangga.

Berdasarkan rekomendasi Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan Kabupaten Sidoarjo dan perangkat Kecamatan Jabon, yang didukung dengan kesesuaian karakteristik desa dengan kriteria desa tertinggal, maka Desa Kupang dipilih sebagai lokasi penelitian “Arahan Pengembangan Desa Tertinggal di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo”. Desa Kupang merupakan desa dengan jumlah keluarga miskin terbesar di Kecamatan Jabon yaitu sebesar 43,68 %. Akses keluar dan masuk desa yang rendah karena adanya keterisolasian geografis menyebabkan perkembangan Desa Kupang terhambat, baik dari segi fisik maupun non fisik desa. Desa Kupang yang kurang dapat berkembang menyebabkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk Desa Kupang.

Berdasarkan gambaran mengenai Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah yang berkembang pesat, maka timbul pertanyaan yang menyangkut desa tertinggal seperti apakah yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo dan mengapa masih terdapat desa tertinggal di wilayah yang maju tersebut.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun beberapa permasalahan yang terdapat di lokasi studi yang berkaitan dengan kajian mengenai “Arahan Pengembangan Desa Tertinggal di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo (studi kasus : Desa Kupang)”, antara lain adalah :

1. Buruknya akses jalan yang menghubungkan desa tertinggal dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial terdekat serta daerah lain di Kecamatan Jabon. Buruknya akses jalan berdampak pada rendahnya akses pasar, akses pendidikan dan akses kesehatan sebagai penunjang kesejahteraan penduduk desa. Rendahnya akses pasar berdampak pada sulitnya pemenuhan kebutuhan pokok dan berpengaruh pada tingginya harga bahan pokok di desa tertinggal sehingga biaya hidup yang dibutuhkan penduduk desa tertinggal di Kecamatan Jabon menjadi lebih mahal bila dibandingkan dengan daerah lain yang lebih berkembang. Rendahnya akses pendidikan berdampak pada rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia desa tertinggal sedangkan rendahnya akses kesehatan menyebabkan penduduk desa tertinggal kurang mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat. Selain jauhnya jarak dengan daerah sekitar, rendahnya aksesibilitas (keterjangkauan) juga disebabkan karena terdapat isolasi geografis yang berupa lahan pertambakan. Penduduk desa tertinggal yang tinggal di sekitar lahan pertambakan pada umumnya tinggal tersebar dengan jalan tangkis tambak sebagai satu-satunya akses jalan. Ketika musim penghujan, akses jalan darat akan sama sekali terputus.
2. Adanya homogenitas mata pencaharian di desa tertinggal yaitu di sektor pertanian, baik pertanian sawah atau perikanan darat. Homogenitas mata pencaharian tersebut disebabkan karena luasan guna lahan desa yang didominasi lahan pertanian dan perikanan darat, yaitu seluas 71,82 % dari luasan desa. Sebesar 76,82 % penduduk desa tertinggal bekerja sebagai buruh pertanian karena tidak memiliki lahan sendiri. Pemilik lahan pertanian di Desa Kupang pada umumnya berasal dari Kecamatan Sidoarjo dan daerah lain di luar Kecamatan Jabon. Selain itu, penduduk desa yang tidak memiliki banyak ketrampilan lain di luar sektor pertanian menyebabkan kecenderungan untuk lebih memilih bekerja di lahan pertanian bila dibandingkan bekerja di sektor jasa atau industri pengolahan. Homogenitas mata pencaharian sebagai buruh tani menjadi sebuah hal yang kurang menguntungkan dalam peningkatan kesejahteraan penduduk desa tertinggal. Pengelolaan lahan pertanian yang sangat bergantung pada kondisi alam atau

cuaca menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan penduduk karena pendapatan yang tidak pasti dan rawan terjadinya gagal panen. Permasalahan tersebut menjadi lebih besar dengan adanya pencemaran buangan lumpur dan limbah pabrik yang tidak melewati proses pengolahan (*treatment*) terlebih dahulu.

3. Belum terdapat fasilitas kesehatan di desa tertinggal sehingga penduduk desa harus menempuh jarak yang cukup jauh jika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi Desa Kupang, mengingat telah terjadi beberapa musibah dan kematian yang disebabkan karena keterlambatan penanganan medis.
4. Kualitas Sumber Daya Manusia di desa tertinggal yang masih rendah, yang ditunjukkan dengan tingkat pendidikan penduduk desa yang mayoritas di antaranya (59 %) hanya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan di tingkat Sekolah Dasar. Selain karena sulitnya akses menuju fasilitas pendidikan terdekat, sedikitnya kuantitas KBM, buruknya kondisi bangunan sekolah dan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar yang kurang menyebabkan Sumber Daya Manusia desa tertinggal tidak mampu berkembang.
5. Teknologi yang digunakan dalam pengelolaan lahan pertanian di desa tertinggal masih tradisional dan masih belum memiliki industri pengolahan hasil produksi pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah produk ketika dipasarkan. Rendahnya teknologi tersebut disebabkan karena keterbatasan kemampuan modal penduduk dalam pengadaan peralatan untuk proses produksi serta keterbatasan ketrampilan penduduk dalam pengolahan produk turunan hasil pertanian.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik Desa Kupang sebagai salah satu desa tertinggal di Kecamatan Jabon?
2. Faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap perkembangan Desa Kupang?
3. Bagaimana strategi dan arahan pengembangan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perekonomian penduduk Desa Kupang?

1.4. Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi karakteristik Desa Kupang sebagai salah satu desa tertinggal di Kecamatan Jabon.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap perkembangan Desa Kupang di Kecamatan Jabon.
3. Menyusun strategi dan arahan pengembangan Desa Kupang dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian penduduk.

1.4.2. Sasaran Penelitian

Sasaran atau output yang hendak dicapai dalam penelitian adalah penggalan potensi Desa Kupang sebagai salah satu desa tertinggal di Kecamatan Jabon sehingga dapat diketahui potensi ekonomi lokal yang dimiliki desa tersebut, yang selanjutnya akan digunakan untuk menyusun arahan pengembangan dengan memanfaatkan keterbatasan kondisi alam secara optimal sehingga Desa Kupang dapat menjadi daerah yang berkembang secara bertahap dan berkelanjutan.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian, antara lain:

1. Manfaat bagi akademisi :
Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan maupun pemikiran untuk penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan desa tertinggal yang masih terdapat di berbagai wilayah, termasuk dalam wilayah yang memiliki kedekatan dengan pusat kota. Karakteristik dasar dari desa tertinggal tersebut pada umumnya memiliki kesamaan sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu model acuan dari penelitian selanjutnya.
2. Manfaat bagi pemerintah :
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Jabon dan Desa Kupang, terutama untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengembangan wilayah yang masih tertinggal, yang kurang dapat menikmati hasil pembangunan daerah. Serta sebagai arahan pengembangan yang berbentuk program-

program yang dapat dilaksanakan dalam lingkungan wilayah yang masih tergolong miskin.

3. Manfaat bagi masyarakat :

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan perekonomian dan peningkatan pendapatan masyarakat Desa Kupang, serta dapat menyelesaikan berbagai bentuk permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut sehingga masyarakat di Desa Kupang juga memiliki kesejahteraan sosial dan ekonomi yang cukup baik

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

1.6.1. Ruang Lingkup Wilayah Studi

Kecamatan Jabon memiliki luas wilayah sebesar 80,99 km² dengan ketinggian wilayah 3 m di atas permukaan laut. Jumlah penduduk di Kecamatan Jabon pada tahun 2009 adalah 47.678 jiwa. Sebanyak 20,56% atau 9.802 jiwa merupakan penduduk miskin. Kecamatan Jabon terbagi menjadi 15 desa dan kelurahan. Sebanyak 11 desa dan kelurahan di Kecamatan Jabon terklasifikasi dalam desa merah karena memiliki jumlah penduduk miskin lebih dari 18,70 %. Batas administrasi Kecamatan Jabon adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Porong dan Kecamatan Sidoarjo
- Sebelah Barat : Kecamatan Porong
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Timur : Selat Madura

Berdasarkan Pemetaan Kemiskinan Hasil Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2005, persentase penduduk miskin terbanyak berada di Desa Kupang (43,68 %). Desa Kupang memiliki luas wilayah sebesar 13,04 km² dan memiliki jumlah penduduk sebesar 3568 jiwa atau 1166 KK. Adapun batas-batas wilayah Desa Kupang adalah sebagai berikut:

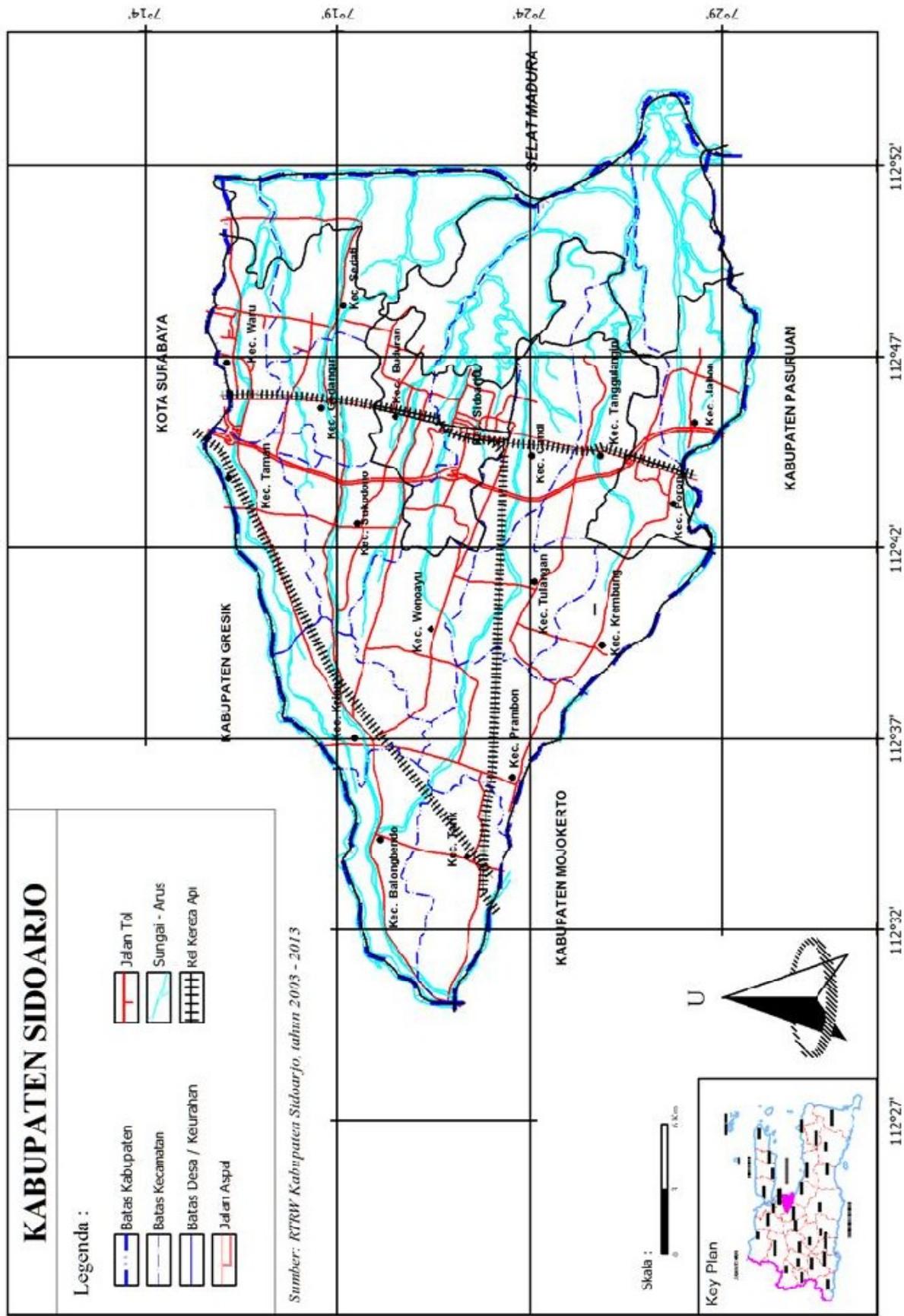
- Sebelah Utara : Desa Tambakkalisogo dan Desa Gebang (Kecamatan Sidoarjo)
- Sebelah Barat : Desa Tambakkalisogo, Desa Semambung (Kecamatan Jabon dan Selat Madura).
- Sebelah Selatan : Desa Kedungrejo dan Desa Kedungpandan

- Sebelah Timur : Desa Balongtani dan Desa Permisian

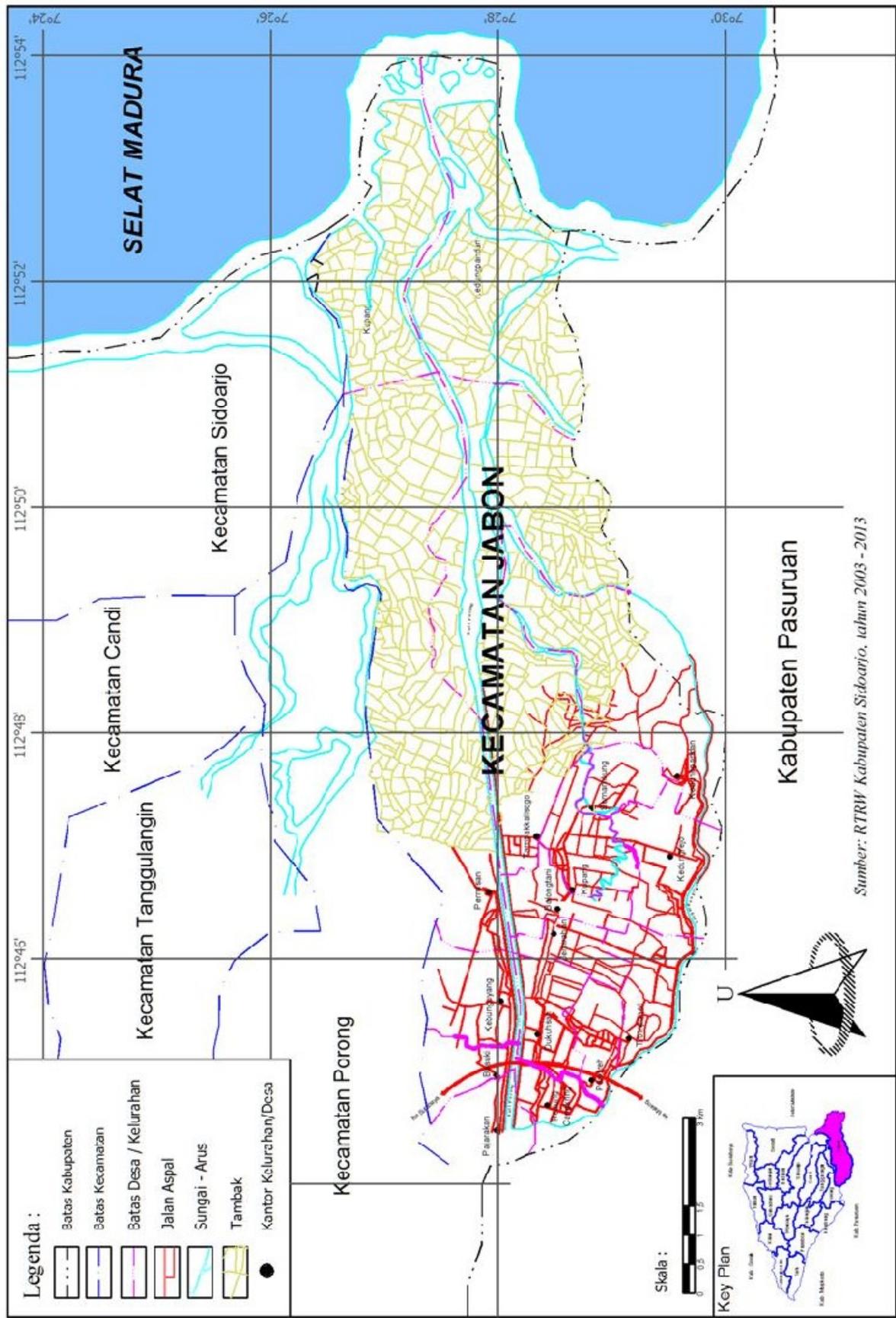
1.6.2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini dibatasi pada pembahasan sebagai berikut :

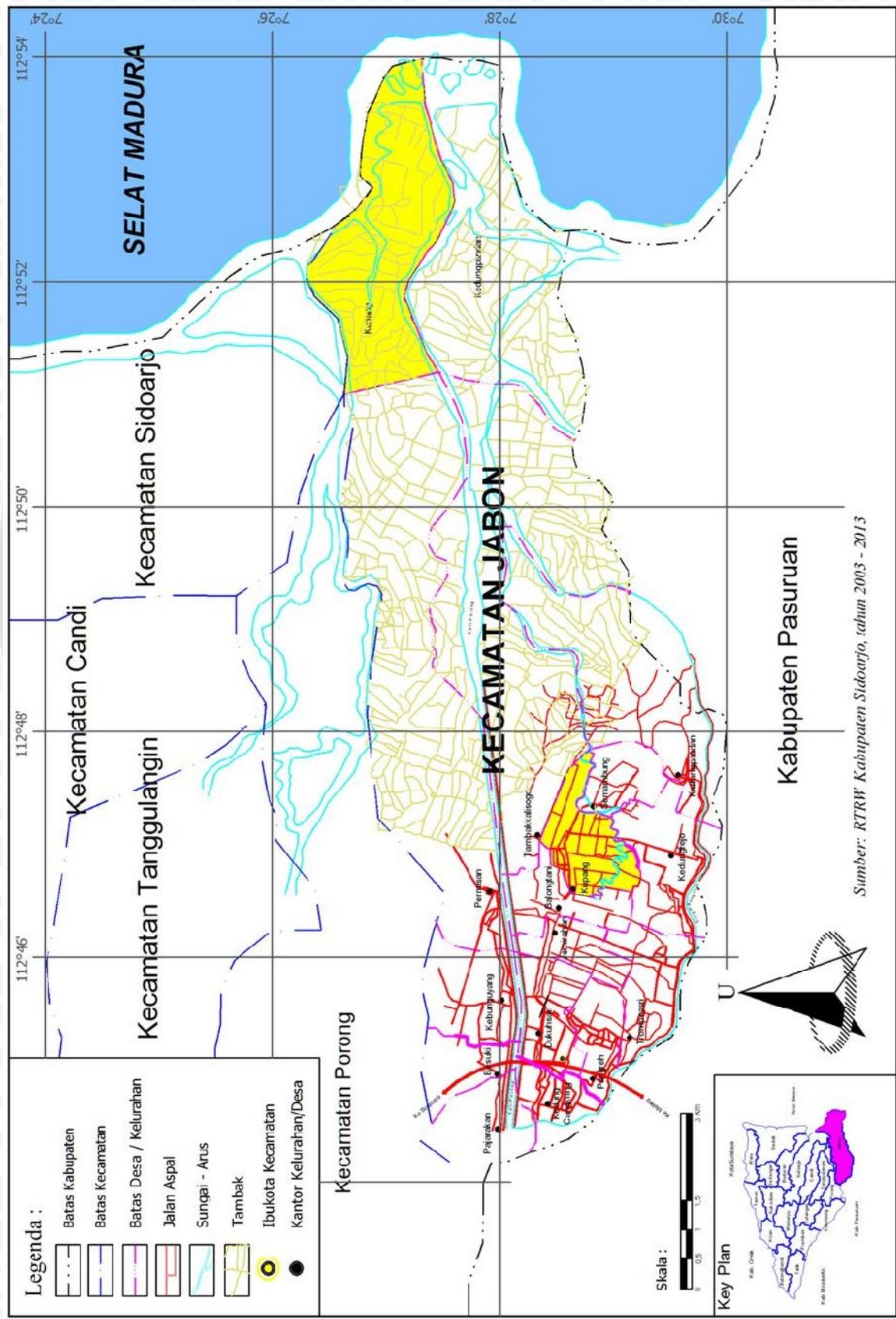
1. Karakteristik desa tertinggal terdiri atas tiga macam karakteristik yaitu karakteristik fisik, karakteristik perekonomian masyarakat dan karakteristik sosial budaya. Karakteristik fisik desa tertinggal meliputi kondisi geografis, akses, jenis bangunan perumahan serta utilitas dan sanitasi. Karakteristik perekonomian masyarakat desa tertinggal meliputi tingkat kesejahteraan, jenis mata pencaharian, kualitas angkatan kerja serta kepemilikan lahan dan harta benda. Karakteristik sosial budaya desa tertinggal meliputi pendidikan, kesehatan dan aktivitas sosial.
2. Mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan Desa Kupang sebagai salah satu desa tertinggal di Kecamatan Jabon.
3. Mencari akar permasalahan yang terjadi di Desa Kupang sekaligus merumuskan pemecahan permasalahan tersebut.
4. Penyusunan strategi dan arahan pengembangan Desa Kupang sebagai salah satu desa tertinggal di Kecamatan Jabon. Arahan pengembangan ini berisi rekomendasi-rekomendasi program yang mampu mendukung perkembangan desa tertinggal.



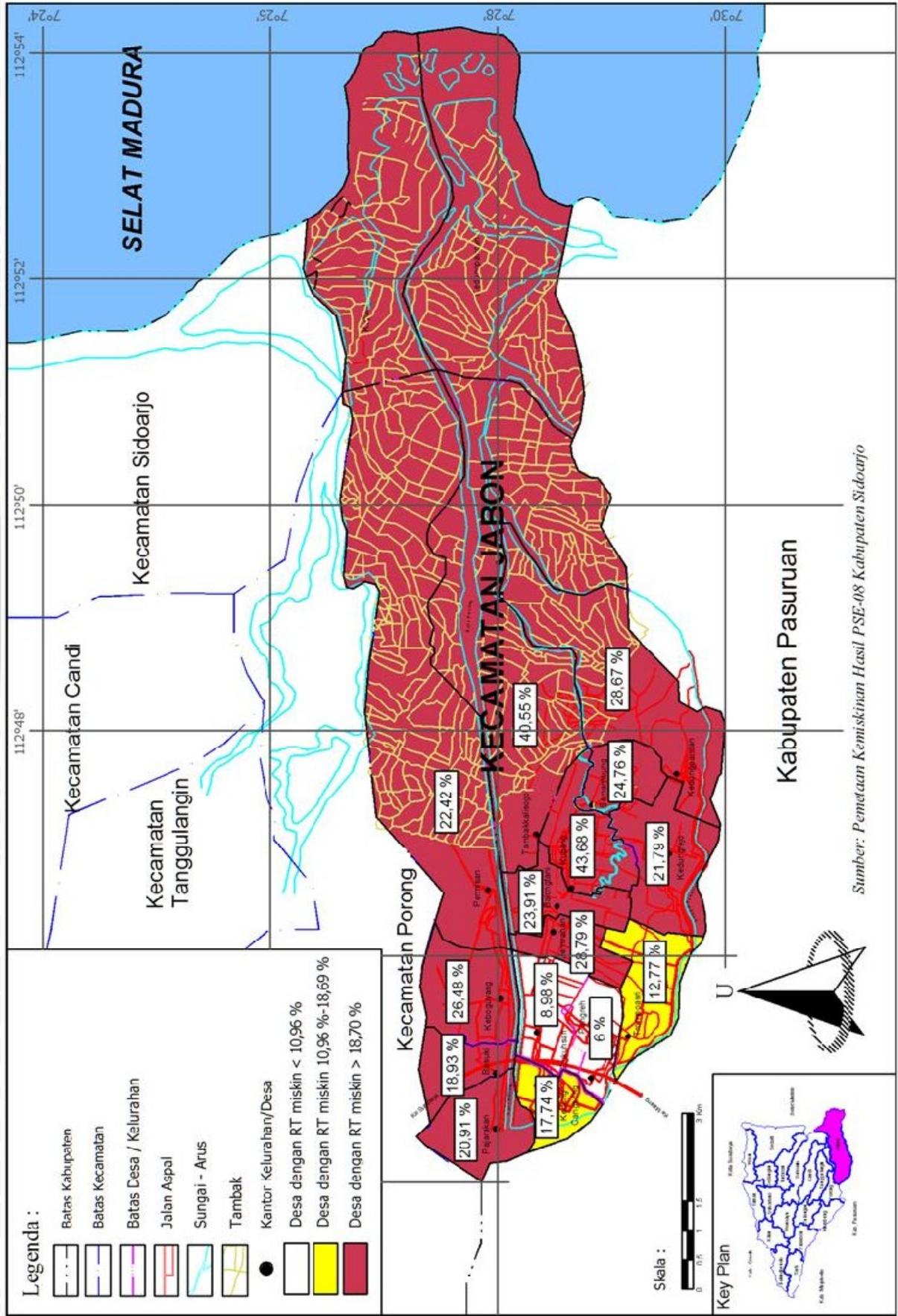
Gambar 1.2 Peta Administrasi Kabupaten Sidoarjo



Gambar 1. 3 Peta Administrasi Kecamatan Jabon



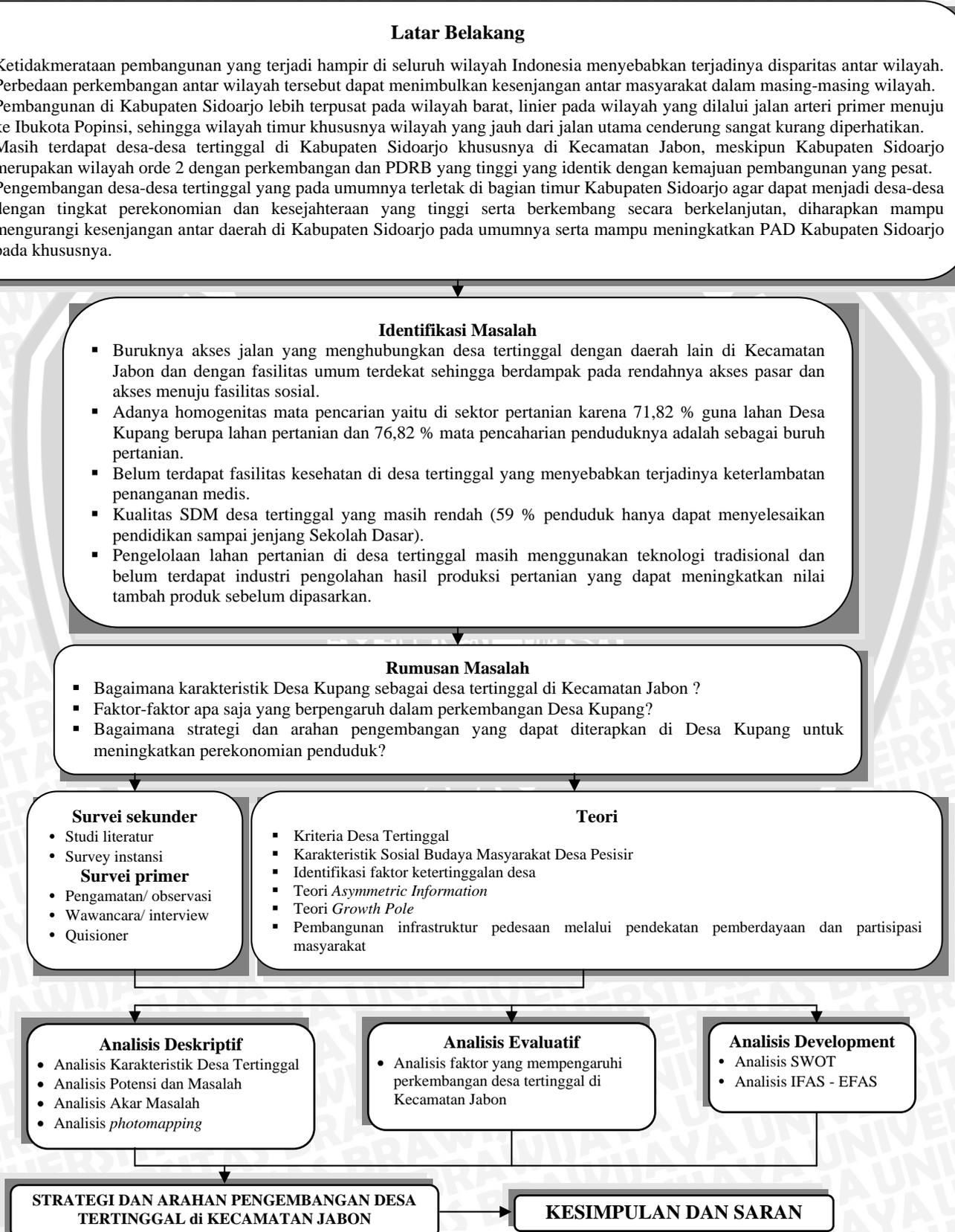
Gambar 1. 4 Peta Administrasi Desa Kupang



Gambar 1.5 Peta Desa Miskin Berdasarkan Prosentase Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Jabon

1.7. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang terdapat di Desa Kupang sebagai salah satu desa tertinggal di Kecamatan Jabon, maka dapat dibuat sebuah kerangka pemikiran (gambar 1.6).



Gambar 1. 6 Kerangka Pemikiran

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

